

Peta Kajian Hukum Ekonomi Syariah pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES)

Ahmad Chairul Hadi¹, Moh Mujiburrohman², Ai Rahmawati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

chairul.hadi@uinjkt.ac.id¹, mujibur.rohman@uinjkt.ac.id²,

rahmawati.ai119@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to map the development and relevance of the research objects in the theses of students of the Master of Sharia Economic Law (MHES) Program in relation to the existing curriculum. Based on an analysis of 131 theses published between 2014 and 2024, it was found that students' research focuses are highly diverse and reflect the dynamic development of the field of Sharia economic law. The most dominant research themes include the implementation of fiqh muamalah, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations in Islamic banking products; the application of law in Islamic insurance; zakat and waqf management; institutional studies of cooperatives and Baitul Maal wat Tamwil (BMT); and studies of non-bank Islamic financial institutions such as the Islamic capital market, leasing, fintech, and Islamic pawnshops. In addition, several studies examine hajj fund management, halal product assurance, judicial decisions in Sharia economic disputes, the economic thoughts of prominent Islamic scholars, and various contemporary issues such as bankruptcy, mergers, digital transactions, customer data protection, governance, risk management, and business ethics. The findings indicate that MHES theses generally focus on regulatory studies, policy implementation, supervision, evaluation, and dispute resolution within both bank and non-bank Islamic financial institutions, while also addressing emerging issues in Islamic economics. These findings highlight the importance of curriculum renewal to ensure its continued relevance to industry needs and contemporary business developments. Efforts that should be undertaken include designing a curriculum based on graduate user needs and incorporating additional subjects such as Islamic financial dispute law, Islamic bankruptcy law, digital transactions, cyber law and customer data protection, as well as global and international trade.

Keywords : Contemporary Islamic Economics, Islamic Law, Research Mapping.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan dan relevansi objek penelitian tesis mahasiswa Program Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) dengan kurikulum yang berlaku. Berdasarkan telaah terhadap 131 tesis periode 2014-2024, ditemukan bahwa fokus kajian mahasiswa sangat beragam dan mencerminkan dinamika perkembangan bidang hukum ekonomi syariah. Tema penelitian yang paling dominan antara lain: penerapan fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK pada produk perbankan syariah; penerapan hukum pada asuransi syariah; pengelolaan zakat dan wakaf; kajian kelembagaan koperasi/BMT; serta kajian lembaga keuangan non-bank seperti pasar modal syariah, leasing, fintech, dan pegadaian syariah. Selain itu, sejumlah penelitian menyoroti pengelolaan dana haji, jaminan produk halal, analisis putusan hakim dalam sengketa ekonomi syariah, kajian pemikiran tokoh ekonomi syariah, serta berbagai isu kontemporer seperti kepastian, merger, transaksi digital, perlindungan data nasabah, tata kelola, manajemen risiko, hingga etika bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tesis-tesis MHES pada dasarnya berfokus pada studi regulasi, implementasi kebijakan, pengawasan, evaluasi, serta penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah bank maupun non-bank, disertai pengkajian isu-isu ekonomi syariah yang berkembang. Temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan kurikulum agar

tetap relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan bisnis kontemporer. Upaya yang perlu dilakukan antara lain penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pengguna lulusan, serta penambahan muatan kajian seperti hukum persengketaan keuangan syariah, kepailitan syariah, transaksi digital, hukum siber dan perlindungan data nasabah, serta perdagangan global/internasional.

Kata kunci : Ekonomi Syariah Kontemporer, Hukum Syariah, Peta Kajian.

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang berkembang seiring dengan kebutuhan ekonomi umat. Di Indonesia, hukum ekonomi syariah mengalami dinamika sejalan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Mulai dari masa pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, orde baru, hingga pasca-reformasi. Hukum ekonomi syariah terus berkembang menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Pada masa ini, ekonomi Islam di Indonesia masih dalam tahap awal dan belum terstruktur secara hukum. Pemikiran ekonomi Islam dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Haji Samanhudi yang mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI) sebagai bentuk awal implementasi ekonomi menurut ajaran Islam (Adnan, 2023). Pada masa penjajahan Belanda, hukum ekonomi Islam tidak diberikan perhatian yang serius oleh pihak kolonial. Pada masa ini, sistem ekonomi yang berlaku di Nusantara masih sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat lokal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk pengaruh agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Meski demikian, belum ada sistem hukum yang secara spesifik mengatur tentang ekonomi syariah. Pengaruh Islam mulai terasa melalui aktivitas perdagangan dan perniagaan di wilayah pesisir (Norrahman, et al. 2023).

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Potret hukum yang dijalankan di Indonesia juga merupakan hukum yang unik, berdasarkan tiga sumber hukum yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum agama yang mayoritas Islam menjadi semakin rumit, problematik, dan penuh tantangan untuk membuat rumusan wajah hukum nasional Indonesia (Itmam, 2019). Berbagai usaha telah dilalui untuk menjadikan hukum Islam melebur dalam bingkai hukum nasional Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia mulai membentuk sistem hukum nasional yang berupaya mengakomodasi berbagai macam sistem hukum yang ada, termasuk hukum Islam. Perkembangan hukum ekonomi syariah di masa ini masih terbatas dan lebih bersifat informal, namun ada upaya untuk mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi nasional (Rasyid, 2017). Hal demikian ditandai dengan adanya beberapa perkembangan regulasi seperti, pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memperkenalkan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah (Zulhendra, 2021). Dalam penelitian lain, penguatan hukum ekonomi syariah baru terbit regulasinya pada fase *hadarah* yang bermula dengan pemikiran Qodri Azizy dengan ekliktisisme yang dihadapkannya (Mubakkirah, et al. 2022).

Selama Orde Baru, hukum ekonomi syariah semakin berkembang dengan adanya berbagai regulasi yang mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah. Pada tahun 1991, berdirinya Indonesia Muamalat Bank (BMI) sebagai bank syariah pertama yang menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang BPR Syariah juga memperkuat landasan hukum ekonomi syariah. Pada era Orde Baru (1966-1998), ekonomi syariah mulai mendapatkan perhatian lebih serius dengan lahirnya berbagai regulasi dan institusi yang mendukung. Salah satu tonggak penting adalah pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pemerintah juga mulai mengembangkan regulasi yang mengakomodasi perbankan syariah, seperti Undang-Undang Perbankan yang memperkenalkan prinsip bagi hasil (Rasyid, 2016).

Setelah reformasi, hukum ekonomi syariah mengalami transformasi yang signifikan. Pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat regulasi terkait lembaga keuangan syariah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga memperkuat pengawasan terhadap produk dan layanan syariah. Era pasca reformasi (setelah 1998) ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang hukum ekonomi syariah. Pemerintah dan masyarakat semakin mengakui pentingnya sistem ekonomi syariah yang diatur secara formal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu landasan hukum yang kuat dalam perkembangan ekonomi syariah. Selain itu, didirikannya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) juga menandai komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan kompetitif (Jahar, 2015). Kondisi hukum ekonomi syariah di Indonesia sarat dengan muatan politik ekonomi. Menurut Mahfud Politik hukum adalah "*legal policy*" atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (MD, 2009). Dengan demikian politik hukum adalah pilihan hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (Wahjono, 1986). Selain itu politik hukum juga bermakna kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan dimaksud dapat berkaitan dengan

pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Dari definisi ini dapat difahami bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang atau *ius constituendum* (Syaukani & Thohari, 2008).

Dalam politik hukum Indonesia, pemikiran dan gagasan tentang konsep ekonomi syariah sudah direpresentasikan dalam praktek perbankan syariah. Pembentukan sistem ekonomi Syariah di tengah praktek ekonomi kontemporer realisasinya belum banyak merambah di tingkat pasar dan sektor ril sehingga sampai hari ini masih terbatas pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Fokus kajian tentang ekonomi syariah dalam politik hukum Indonesia pada dasarnya merepresentasikan bahwa tingkat kemajuan regulasi dan implikasi kontemporer kelembagaan prinsip syariah dalam operasional kegiatan usaha perbankan di Indonesia telah menjadi titik tolak bagi aktualisasi dan akselerasi sistem ekonomi syariah namun, eksistensi dan legitimasinya sebagai konsep sistem ekonomi alternatif dalam tata kegiatan usaha bisnis global kontemporer justru masih dihadapkan pada kompleksitas problem tata hukum dan dominasi sistem ekonomi konvensional. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa operasional ekonomi syariah dengan segala spesifikasi karakteristiknya telah menjadi keniscayaan alternatif baik di dunia internasional maupun nasional khususnya di Indonesia (Hasan, 2010).

Berkembangnya kajian-kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia, maka program studi magister hukum ekonomi syariah konsen dengan tema-tema tersebut. Untuk mendapatkan hasil (*result*) dari sebuah proses belajar mengajar di jenjang magister pada level delapan kualifikasi nasional, maka dipandang penting untuk pengembangan Program Magister Dalam Peta Kajian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Oleh sebab itu perlu dikaji bagaimana perkembangan kajian tesis hukum ekonomi syariah dan relevansinya dengan kurikulum Program studi Hukum Ekonomi Syariah Priode 2014-2024?. Hal ini perlu dianalisa dalam rangka mengembangkan kurikulum program magister dan menyiapkan sumber daya insani yang kompeten dalam bidang hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala dalam kehidupan manusia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tujuan mengelompokkan dan menganalisis judul-judul tesis pada bidang Hukum Ekonomi Syariah secara sistematis dan faktual. Data primer diperoleh dari database perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum berupa kumpulan tesis Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014-2024, sedangkan data sekunder bersumber dari jurnal, buku, surat kabar, dan publikasi relevan lainnya.

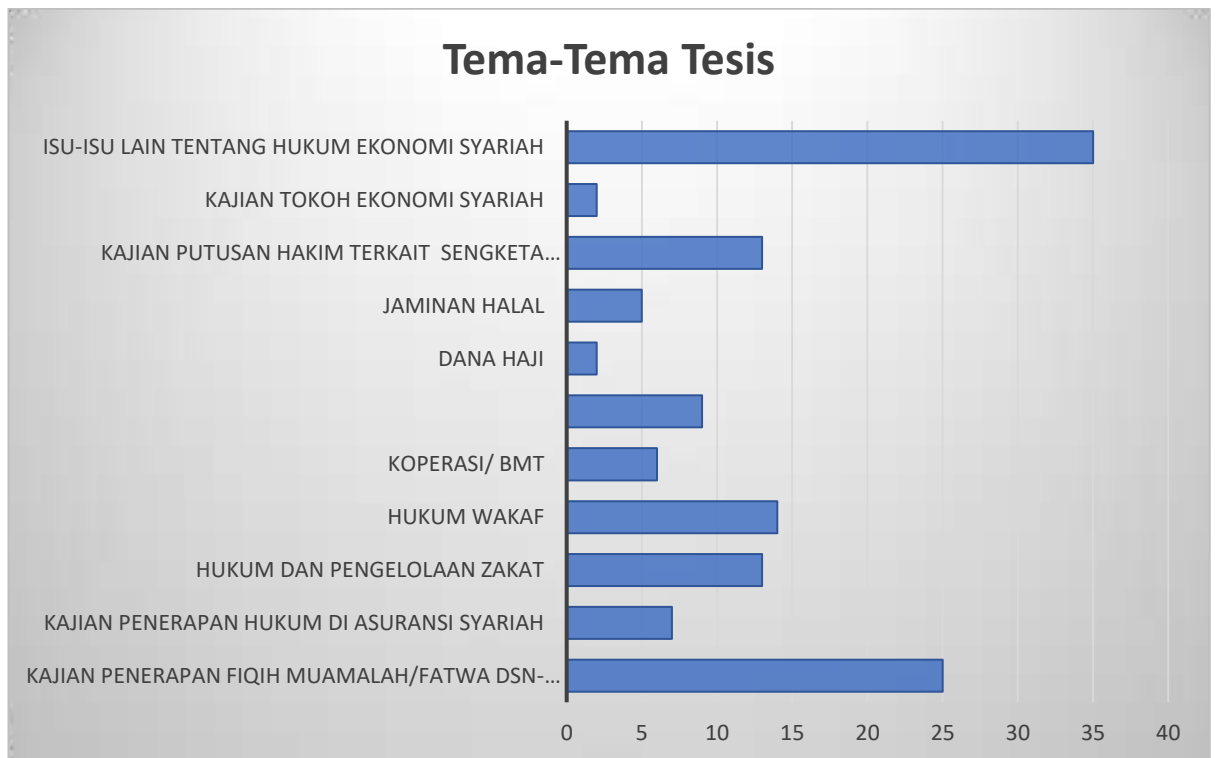
Teknik pengumpulan data meliputi penelitian pustaka, penelitian sensus terhadap seluruh judul tesis dalam rentang tahun tersebut, serta dokumentasi berbagai literatur pendukung. Analisis data dilakukan melalui dua teknik, yaitu analisis framing untuk mengidentifikasi bingkai pemikiran dan latar budaya yang membentuk pemahaman terhadap suatu tema, serta analisis kategorisasi untuk mengelompokkan judul-judul tesis guna memetakan isu-isu yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Klaster

Berdasarkan penelusuran data-data yang merujuk pada repository Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta atau data Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Terdapat 131 tesis yang dihasilkan oleh program Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2014 - 2024

No	Tema-Tema Tesis	Jumlah
1	Kajian Penerapan Fiqih Muamalah/Fatwa DSN-MUI/Pojk Dalam Produk Bank Syariah	25
2	Kajian Penerapan Hukum Di Asuransi Syariah	7
3	Hukum Dan Pengelolaan Zakat	13
4	Hukum Wakaf	14
5	Koperasi/ BMT	6
6	Pasar Modal , <i>Leasing Syariah</i> , <i>Fintech Syariah</i> , Pegadaian Syariah	9
7	Dana Haji	2
8	Jaminan Halal	5
9	Kajian Putusan Hakim Terkait Sengketa Ekonomi Syariah	13
10	Kajian Tokoh Ekonomi Syariah	2
11	Isu-Isu Lain Tentang Hukum Ekonomi Syariah	35
	Total	131



1. Kajian Penerapan Fiqih Muamalah/Fatwa DSN-MUI/Pojk Dalam Produk Bank Syariah

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21200433000006	Nenden Gina Inayatillah	Kesesuaian Kontrak Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)
2	21210433000003	Yusuf	Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Murabahah Kedalam POJK No. 29/POJK.03/2019
3	21220433000019	Mohamad Natsir	Pengaturan Gramasi Minimal Dalam Fitur Jual dan Cetak Emas Digital Serta Implikasinya Terhadap Kabsahan Akad (Analisis Fikih Muamalah dan Ushul
4	21210433000008	Hisyam Hadi	Bai' Al-Dayn dalam Perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia dan Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islamy Al-Dauli Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
5	21210433000011	Syahrul Romadon Rambe	Pembiayaan Sindikasi Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Standar AAOIFI
6	21210433000013	M. Hilal Afdhal	Akad Syariah Card (Bitâqah Al-I'timân):

			Komparasi Fatwa DSN-MUI, Majma' Al-Fiqh Al-Islâmî Dan AAOIFI
7	21190433000019	Hana Faizah	Apliasi Snack Video Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 75/ DSN-MUI/VII.2009 dan Efektifitas Implementasi UU No. 19 Tahun 2016
8	21210433000005	Mujibu Da'wat	Ketentuan Mun'ah dalam Praktik Rahn di Lembaga Keuangan Syariah
9	21210433000017	Adi Nurhani Mufrih	Kepastian Hukum Hak Atas Manfaat Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Menurut Fatwa DSN-MUI, Majelis Penasehat Syariah Malaysia
10	21190433000004	Ahmad Mutamimul Ula	Fatwa Ta'zir dan Ta'widh Perbankan Syariah Serta Adopsinya di Lembaga Otoritas Keuangan Syariah
11	21190433000021	Tito	Kepatuhan Syariah Skema Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Proyek Pembangunan
12	21160433000001	Muhammad Nabhani	Analisis Muwa'adah dalam Transaksi Hedging Syariah (Studi Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI)
13	21180433000018	Sitti Aslamiah	Dampak Hukum Disharmonisasi Regulasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Kinerja Perbankan Syariah
14	21180433000020	Asri Dewi Rufaidah Hasanah	Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perjanjian terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga
15	21180433000022	Muta'addibah Ashri	المخارج الفقهية في الفتاوى للهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء (المشاركة المتناقصة والمشاركة المنتهية بالتمليك)
16	21160433100017	Riniwati	Metode Anuitas Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/ DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah Di
17	21160433000006	Mujhid Budi Luhur	Hukum Wa'ad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) dalam Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia)
18	21170433000006	Eni Nuraeni Maryam	Pengaturan Produk dan Pengawasan Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

19	21160433000002	Wahid Syafruddin	Konversi Aqad Musyarakah ke Aqad Lain Perspektif Fiqih Muamalah
20	21140433100012	Najikha Akhyati	Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Peraturan Perundang-Undangan
21	21150433100011	Ardiansyah Putra	Reformasi Hukum Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan (Analisis Fatwa Ijarah Maushufah Fi Dzimmah No.102/ DSN-MUI/X/2016 Untuk Ppr
22	21150433100009	Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq	Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Tentang Mudarabah Dalam Regulasi Otoritas Jasa
23	21140433000002	Qumi Andziri	Akad Pengalihan Utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS)
24	21120433000003	Baihaqi	Pengaruh Fatwa DSN-MUI terhadap Pelaksanaan Transaksi Tawarruq
25	21150433000001	Hatoli	Aplikasi Dalil Masalah Terhadap Problematika Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer di Indonesia (Kajian Fatwa-

2. Kajian Penerapan Hukum Di Asuransi Syariah

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21210433000012	Ucu Solihah	Pengelolaan Kontribusi Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia
2	21200433000008	Muhammad Fikri Auliaurrahman	Teori Dan Praktek Akad Wakalah Bil Ujah dalam Produk Asuransi Syariah (Studi Implementasi Fatwa DSN 52/2006 dan Hukum Kontrak Pada Polis
3	21130433000004	Prilla Kurnia Ningsih	Kompetensi Agen Asuransi Syariah Dan Pencapaian Target Penjualan Produk Unit Link di PT. Prudential Life Indonesia
4	21210433000012	Ucu Solihah	Pengelolaan Kontribusi Asuransi Syariah di Indonesia Dan Malaysia
5	21190433000009	Eko Ramadhani Nanto	Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Polis Asuransi Syari'ah
6	21160433000003	Syukron	Kepailitan Dan Perlindungan Peserta PT. Asuransi Syariah Mubarakah dalam Konteks

			Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
7	2113043300004	Prilla Kurnia Ningsih	Kompetensi Agen Asuransi Syariah dan Pencapaian Target Penjualan Produk Unit Link di Pt Prudential Life Indonesia

3. Hukum Dan Pengelolaan Zakat

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21200433000010	Moh. Zainul Akmali	Zakat Profesi Youtuber Perspektif Ulama Kontemporer dan Undang-Undang
2	21200433000014	Hairul	Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012
3	21200433000004	Rahmat Hidayat	Penyalahgunaan Dana Zakat Di Beberapa Daerah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
4	21190433000022	Siti Cahyani	Efektifitas Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia
5	21180433000006	Sahid Abdullah	Zakat Fitrah Menggunakan Uang (Analisis Komparasi Pandangan Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i & Undang Undang No 23
6	21190433000022	Siti Cahyani	Efektifitas Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia
7	21180433000006	Sahid Abdullah	Zakat Fitrah Menggunakan Uang (Analisis Komparasi Pandangan Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i & Undang Undang No 23
8	21180433000014	Rahmat Muhaajir	Distribusi Zakat Baznas Kota Tidore Kepulauan di Era Pandemi
9	21190433000006	Diah Larasati	Pembaruan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional (Perspektif Para
10	21170433000004	Dhiana Awaliyah Prana Dipa	Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi Sabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan
11	21150433100012	Edi Wijayanto	Kepatuhan Masjid-Masjid Di Tangerang Selatan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
12	21120433000015	Kadarisman	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fundraising Zakat Badan Amil Zakat Nasional

			(Baznas) Se-Provinsi Banten
13	21140433000007	Hani Tahliani	Good Corporate Governance Di Lembaga Pengelola Zakat (Analisis Implementasi Dan Regulasi)

4. Hukum Wakaf

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21210433000031	Kiki Damayanti	Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pengembangan Investasi Syariah Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Ekonomi
2	21200433000015	Fathimah Az Zahra	Keabsahan Hukum Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang
3	21210433000009	Mawaddah Rahmah	Reformasi Hukum Wakaf Tanah Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Di Indonesia
4	21200433000003	Rauzatul Mulia	Wanpretasi Dalam Ruslag Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Sigli Banda Aceh Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam
5	21200433000020	M. Zahid Ainul Yaqin	Pelaksanaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif
6	21210433000029	Rizqiyah	Peralihan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Tangerang Selatan (Studi Kasus Terhadap Sdn Ciledug Timur)
7	21180433000003	Aulia Khairunnisa	Mekanisme Dan Tanggung Jawab Nazir Dalam Mengumpulkan Serta Menyalurkan Dana Wakaf
8	21180433000019	Khoirotul Islamiyah	Status Hukum Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di
9	21180433000021	Syamsul Fajrin	Regulasi Wakaf Berbasis Saham (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia)
10	21190433000002	Elina Adi Wijayanti	Hutan Wakaf Bogor Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam
11	21170433100010	Neneng Puspitasari	Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia
12	21160433100010	Sinwani	Hukum Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk

			Penanggulangan Bencana Pandemi Covid 19: Perbandingan Badan Wakaf Indonesia Dan Yayasan
13	21160433100018	Helmi Abdullah	Perlindungan Hukum Wakaf Saham Di Perseroan Terbatas
14	21140433100016	Mariya Ulpah	Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Model Pengembangan

5. Koperasi/ BMT

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21180433000010	Kurniyati Rabrusun	Pailitisasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Analisis Putusan Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/Pn.Niaga Jkt Pst)
2	21190433000007	Neng Nadiyya Syaima	Transformasi Social Trust Fund Unit Dompot Dhuafa Menjadi Koperasi Syariah (Dalam Perspektif Uu No 17 Tahun 2012, Peraturan Menteri
3	21180433000010	Kurniyati Rabrusun	Pailitisasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Analisis Putusan Nomor 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/Pn.Niaga Jkt Pst)
4	21190433000001	Rifa Berliana Arifin	Dualisme Pengawasan Dalam Operasionalisasi Baitul Māl Wa Tamwil (BMT) di Jawa Barat
5	21150433100013	Handieni Fajrianty	Kepastian Hukum Baitul Mal Wat Tamwil Tinjauan Undang-Undang Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro
6	21140433000006	Asep Sopian	Model Pengawasan KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan-Jawa Timur

6. Pasar Modal , Leasing Syariah, Fintec Syariah, Pegadaian Syariah

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21200433000017	Ahmad Fauzi	Pengawasan Insider Trading Pada Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah
2	21210433000024	Upi	Aspek Hukum Produk Cicil Emas Pada Lembaga Pegadaian Syariah
3	21210433000020	Maulidia Permata Citra	Syariah Compliance Pada Akad Murabahahdi Perusahaan Leasing Syariah
4	21180433000005	Elgi Nurfalahi	Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi

5	21190433000020	Akhyar M. Daud	Investasi Saham Pasar Modal Syariah Di Kota Banda Aceh Dalam Konteks Hukum
6	21190433000008	Ariyall Hikam Pratama	Crypto Asset Dan Currency Dalam Prespektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, Peraturan Bappebti dan Tinjauan
7	21200433000007	Musaiyana	Dinamika Cryptocurrency Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional
8	21180433000005	Elgi Nurfalahi	Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi
9	21140433000008	Harisah	Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura

7. Dana Haji

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21210433000007	Siti Ida Farida	Regulasi Pembiayaan Haji di Indonesia Pada Bank Muamalat Indonesia
2	21140433100013	Inti Ulfi Sholichah	Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

8. Jaminan Halal

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21220433000006	Ahmad Sarifudin	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor Yang Beredar di Indonesia
2	21200433000005	Novita Akria Putri	Urgensi Harmonisasi Undang-Undang Terkait Kewajiban Penyediaan Produk Dan Jasa Pada Pariwisata Halal di Indonesia
3	21170433000005	Laila Yumna	Evaluasi Pengelolaan Dan Kepatuhan Rumah Sakit Bersertifikat Syariah (Studi Kasus Rumah Sakit Sari Asih Ciledug)
4	21180433000009	Andar Zulkarnain Hutagalung	Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)
5	21150433100018	Bintan Dzumirroh Ariny	Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk

9. Kajian Putusan Hakim Terkait Sengketa Ekonomi Syariah

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21190433000013	Syifa Conita	Akuntabilitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Tinggi
2	21210433000018	Afiyah Qurrota A'yun	Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Kesalahan Pelaporan Dalam Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk 159/Pdt.
3	21210433000015	Ummul Khair Mukhlis	Kewenangan Pelaksana Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016
4	21210433000028	Achmad Rifqi Jalaluddin Q	Penyelesaian Sengketa Pada Kasus Side Streaming Pembiayaan Murabahah Nasabah Muslim Dan Non-Muslim Pada Bank BPD Kalbar Syariah Cabang
5	21190433000010	Muhammad Irsyad Noor	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jaminan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta
6	21190433000012	Intan Zahrotuddiniyah	Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Niaga
7	21190433000014	Amalia Karim Seknun	Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama
8	21200433000016	Azka Febriawan	Efektifitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
9	21200433000011	Mohammad Syarifuddin Amarullah	Komparasi Putusan Tentang Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Senopati Dalam Beracara di Pengadilan
10	21180433000012	Rokani Darsyah	Penggunaan Kaidah Usul dan Kaidah Fikih Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Ekonomi Syariah
11	21150433000005	Chairul Lutfi	Komparasi Putusan Mahkamah Agung

			Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan
12	21140433000003	Amelisah	Sengketa Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Perbankan Syariah (Analisis Kasus Pada Dana Pensiun Angkasa
13	21150433000002	Lalu Fahrizal Cahyadi	Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 715k/Ag/2014tentang Klausul Pengalihan Tanggung Jawab Resiko Dalam Perjanjian

10. Kajian Tokoh Ekonomi Syariah

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21180433000016	Khomsatun	Jual Beli Emas Tidak Tunai Menurut Wahbah Al- Zuhaili dan 'Ali Jum'ah Serta Relevansinya Terhadap Uang Elektronik
2	21130433000012	Adam Malik	Sumber Pendapatan Negara Menurut Ibnu Khaldun Dan Al Mawardi Dalam Kitab Al-Muqaddimah Dan Al-Ahkam As-Sulthaniyah

11. Isu-Isu Lain Tentang Hukum Ekonomi Syariah

No.	NIM	Nama	Judul Tesis
1	21210433000016	Abdul Manaf Harahap	Urgensi Pengaturan Kepailitan Syariah di Indonesia
2	21210433000027	Sopian Lubis	Serangan Cyber Dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra Dan Pasca Uu No. 27 Tahun 2022 Tahun 2023 Tentang Pengembangan
3	21190433000003	Sri Hartanti	Akibat Hukum Merger Bank Syariah Indonesia Terhadap Nasabah Funding
4	21190433000015	Faa Izah	Hukum Fundraising Pada Lembaga Filantropi Di Indonesia
5	21190433000018	Fariz Abdul Rohman	Hukum Jual Beli Rumah Dengan Sistem Angsuran Secara Syariah Antara Developer Dan Konsumen
6	21200433000001	Wildatul Fitri	Sistem Dan Prosedur Pelayanan Dalam Social Commerce Reseller: Studi Kasus Platform Evermos Dan DUSDUSAN

7	21180433000013	Yusuf	Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)
8	21200433000002	Siti Romlah	Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
9	21180433000002	Diwangkoro Pradipta	Side Streaming Pada Bank X Syariah Dalam Konteks Hukum Kontrak
10	21180433000008	Mabruri Andatu	Regulasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah Dan Bank Konvensional
11	21190433000017	Imam Taufiq	Perizinan Kepemilikan Aset Perspektif Undang-Undang Perbankan Syariah
12	21180433000004	Mohamad Najib Anis Subekhi	Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Status Badan
13	21160433000005	Rahmat Syaiful Haq	Kapabilitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
14	21180433000024	Abdul Azis	Kepemilikan Bank Syariah Secara Prinsip Atas Obyek Pembiayaan Murabahah
15	21150433100008	Abdul Rauf	Pengaturan Sbis Ju'alah Sebagai Instrumen Pengendalian Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah
16	21150433000008	Yody Tistanto	Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasca Dikeluarkannya Perma Nomor
17	21140433100014	Zainul Arif Andalusi	Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (Pmd) Dengan Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
18	21150433100020	Shofa Fathiyah	Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan No.1901/Pdt.
19	21140433000001	Wulan Siti Mariyam	Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Hawalah Di Bank Muamalat Dan Bprs Al-Saalam
20	21140433100011	Siti Solihah	Pengaturan Kompensasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Plbs) Di

			Indonesia
21	2112043300002	Dewi Nurmaliza	Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Terhadap Mutu Pendidikan Di Adzkia Islamic School
22	2112043300011	Nurdin Pasya	Penerapan Good Corporate Governance Pada Manajemen Operasional, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah Dan Dampaknya
23	2113043300001	Rizal Hendrawan	Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Murabahah Menggunakan Metode Credit
24	2112043300013	Fatimah Raihani	Pengembalian Pembiayaan Mikro Pada Bprs Amanah Ummah Leuwiliang Bogor
25	2112043300014	Ade Irma Suryani	Pengaruh Intensitas Persaingan, Budaya Perusahaan, Serta Kualitas Produk Terhadap Strategi Bisnis Lembaga Keuangan Mikro
26	2113043300007	Suparman Hasyim	Kompetensi Dan Sharia Compliance Notaris Dalam Pembuatan Akta Akad Perbankan Syariah
27	21140433000005	Ali Yusuf Syakir	Tinjauan Hukum Penerapan Kontrak Perjanjian Baku Hasanah Card Bni Syariah
28	2113043300011	Fithrah Kamaliyah	Perbandingan Pengaruh Penerapan Metode Proporsional Dan Anuitas Terhadap Tingkat Risiko Dan Kesehatan Bank Syariah
29	21130433000006	Murtahani Arif	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah
20	2112043300001	Febrianti	Etika Bisnis Penjualan Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah
31	2112043300005	Ivahzada Marella Edgina	Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Dow Jones Industrial Average Dan Inflasi Terhadap Index Saham Syariah: Studi Empiris Di Indonesia,
32	2112043300006	Maharani	Evaluasi Pembiayaan Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Serpong
33	2112043300010	Dila Fadhillatun Nisa	Peran Komite Audit, Audit Internal Serta Dewan Pengawas Syariah Terhadap

			Good Corporate Governance Dan Kinerja Bank
34	2113043300005	Gemilawaty Gemintang	Strategi Pemasaran Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process
35	2113043300006	Moh Anwar Zainuddin	Kepemilikan Rumah Melalui Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Cabang Palu

B. Relevansi Kajian Tesis Program Magister Hukum Ekonomi Syariah dengan Kurikulum dan Pengembangan Kurikulum dengan Kajian Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Seperti diuraikan di atas, tingginya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank serta bisnis syariah, pada sisi lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga-lembaga pendidikan, termasuk Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam memasok SDM yang dibutuhkan tersebut. Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam, khususnya Fakultas Syari'ah, dengan mengambil peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga yang disebutkan di atas. Peran Fakultas Syari'ah dalam menyiapkan SDM ini menjadi sangat strategis sekaligus menantang.

Untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, menguasai sistem ekonomi Islam dan terampil dalam mengelola industri Perbankan Syariah, Keuangan Islam dan bisnis Syariah, sangat ditentukan oleh kurikulum dari suatu institusi pendidikan. Dalam merespon kebutuhan di atas, berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia telah menawarkan pengajaran Ekonomi Islam. Pengajaran Ekonomi Islam di Indonesia yang telah ada sekarang ini, seperti yang dipaparkan dalam *Blue Print Ekonomi Syariah Tahun 2020*, dapat digolongkan menjadi beberapa kategori.

Kategori pertama, diwakili oleh UIN/IAIN, dan dalam hal ini adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat akan perlunya penerapan ekonomi Islam yang ditandai dengan pendirian bank-bank, asuransi dan reksadana syariah, maka Fakultas Syariah UIN Jakarta membuka Jurusan Muamalat dengan format baru. Langkah ini kemudian disempurnakan dengan membuka Progran Studi Perbankan Syariah dan Takaful/Asuransi Islami. Melihat kurikulum yang menjadi acuan pengajaran kedua program studi di atas, tampak bahwa pola pendekatan yang diadopsi oleh UIN Jakarta bobotnya terlalu mengandalkan pengajaran ilmu-ilmu Syariah, tetapi kurang mengandalkan pengajaran ilmu ekonomi dan perbankan modern. Kenyataan ini dapatlah dimengerti karena jurusan yang diberikan masih dalam lingkup Fakultas Syariah. Boleh jadi kelemahan ini merupakan akibat alami dari sifat pendidikan

UIN/IAIN yang sejak dulu memang terfokus pada pengajaran ilmu-ilmu agama (*Islamic studies*). Porsi pengajaran ilmu ekonomi dan perbankan konvensional yang sangat kurang dibarengi dengan pengajaran iptek (ilmu dan teknologi), seperti matematika dan statistika, akan dapat mengakibatkan terjadinya pemahaman yang kurang tepat tentang ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmiah yang terukur menurut kriteria pembelajaran yang sinergis antara *contents*, *conducts*, *contexts* dan *contours*.

Sebenarnya ada perbedaan antara tujuan pengajaran ekonomi Islam untuk melahirkan para ahli di bidang hukum perdata dan niaga Syariah dengan mencetak sarjana yang benar-benar paham tentang ilmu ekonomi konvensional, filosofi ekonomi Islam dan fikih muamalah. Tujuan pengajaran pertama tidak mengharuskan pengajaran yang terinci tentang karakteristik ilmu ekonomi konvensional dengan segala aspek alatnya. Barangkali cukup mengajarkannya secara global dengan pendekatan konseptual saja. Namun pada tujuan kedua, penguasaan terhadap teori ilmu ekonomi kontemporer menjadi suatu keniscayaan, karena tanpa penguasaan aspek ini sulit memahami secara komprehensif ilmu ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmiah sekaligus alternatif dari ilmu ekonomi konvensional.

Perlu diketahui bahwa munculnya gagasan ilmu ekonomis ini sebenarnya justru dari para ekonom yang telah bertahun-tahun dididik dan dilatih dengan ilmu ekonomi barat konvensional dengan segala macam metodologi dan landasan epistemologinya. Hampir seluruh pelopor ekonomi Islam adalah sarjana S3 yang menyelesaikan pendidikannya formalnya di AS, Inggris, Prancis dan negara-negara barat lainnya. Karena keyakinan mereka yang mendalam terhadap Islam sebagai suatu sistem kehidupan (*an applicable way of life*) yang dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, maka mereka menggagas sistem ekonomi Islam yang kemudian dilanjutkan kepada upaya penemuan ilmu ekonomi Islam (*Islamic Economics*) sebagai suatu disiplin ilmiah. Mereka amat yakin bahwa nilai-nilai dan ajaran Islam mampu menjadi premis intelektual dalam bidang apapun. Di samping itu mereka juga melihat kelemahan-kelemahan menonjol dalam landasan teorinya dan pendekatan yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuannya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang peta kajian tesis mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum UIN Jakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peta kajian penelitian tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam lima tema besar yang saling berkaitan. Pertama, sejumlah penelitian fokus pada aspek regulasi transaksi ekonomi syariah, khususnya kajian fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK yang diimplementasikan dalam berbagai produk perbankan syariah. Kedua, banyak penelitian menyoroti praktik muamalah dalam

masyarakat, baik yang berlangsung secara tradisional maupun melalui lembaga keuangan modern. Kajian pada asuransi syariah, zakat, wakaf, koperasi/BMT, serta lembaga keuangan non-bank seperti pasar modal syariah, leasing, fintech, dan pegadaian syariah menunjukkan luasnya spektrum praktik yang diteliti. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengulas pemikiran tokoh-tokoh ekonomi syariah dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu dan praktik ekonomi syariah. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga cukup menonjol, terutama melalui analisis terhadap putusan hakim dalam berbagai kasus. Di samping itu, sejumlah penelitian mengangkat isu-isu manajerial dan operasional lembaga keuangan syariah, seperti tata kelola, manajemen risiko, profitabilitas, kepailitan, merger, perlindungan data nasabah dan keamanan siber, etika bisnis, hingga efektivitas metode pembiayaan. Secara keseluruhan, ragam tema tersebut menunjukkan bahwa penelitian mahasiswa MHES telah berkembang secara komprehensif dengan mencakup dimensi regulasi, praktik kelembagaan, dinamika pemikiran, penyelesaian sengketa, serta isu-isu kontemporer dalam manajemen lembaga keuangan syariah. Narasi ini menggambarkan arah dan keluasan fokus kajian Hukum Ekonomi Syariah selama satu dekade terakhir.

2. Dari 131 tesis periode 2014-2024 hampir semuanya memiliki relevansi dengan muatan kurikulum program studi magister hukum ekonomi syariah, walaupun pada periode awal 2014-2016 (periode perubahan nomenklatur magister ekonomi syariah menjadi hukum ekonomi syariah) banyak mengkaji dari aspek manajemen kelembagaan ekonomi syariah.
3. Upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan perubahan agar kurikulum relevan dengan perkembangan bisnis kontemporer adalah menyusun kurikulum berbasis pengguna lulusan, dan mengembangkan muatan kurikulum dengan isu-isu yang berkembang saat ini seperti hukum persengketaan keuangan syariah, kepailitan syariah, transaksi digital, hukum cyber crime dan perlindungan data nasabah, dan perdagangan global/internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Paijo. Peradaban Ekonomi Islam Sebelum Kemerdekaan Indonesia, (Pranata Ekonomi dan Pemikiran Ekonomi), *Azmina: Jurnal perbankan syariah*, Vol.2, No.2, 2023: 62-70.
- Hasan, Hasbi. *Komptensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara ekonomi Syariah*, Jakarta; Gramata Publishing, 2010.
- Itmam, Muhammad Shohibul. "Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective," *Justicia Islamica* 16, No.2 (2019): 367-94, Available at: <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>.

- Jahar, Asep Saepudin. Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol.39, No.2, 2015. Available at: <https://Doi.Org.10.30821/Miqot.V39i2>.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta; PT. RajaGrafindo, 2009.
- Mubakkirah, Fadhiliah., dkk. Analisis Siklus Teori Pemberlakuan Hukum Islam Pada Penguatan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah. TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No.2, 2022. 101-119.
- Norrahman, RA., dkk. Pengaruh politik hukum colonial belanda terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. Journal of Islamic and law Studies. Vol.7, No.1, 2023.
- Rasyid, Fauzan Ali. Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol.16, No.2, 2017: 297-315. Available at: <https://Doi.org/10.18326/ijtihad.V16i2.297-315>.
- Rasyid, Fauzan Ali. Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, 2016. Available at: <https://Doi.org/10.18326/ijtihad.V16i2.297-315>.
- Syaukani, Imam dan Tohari, A Ahsin. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986), Cet. Ke-2.
- Zulhendra, Joni. Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan. Normatif Jurnal Ilmiah Hukum (2021).